

***ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING AUDIT DELAY IN REGENCIES/CITIES  
OF SOUTH SUMATRA PROVINCE IN 2016-2020***

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATRA SELATAN TAHUN 2016-2020**

**Shelly Krisandri**

Accounting Sector Public Department of State Polytechnic of Sriwijaya

[shellykrissandri@gmail.com](mailto:shellykrissandri@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In the districts and municipalities of South Sumatra, this study seeks to ascertain the size of local governments, audit findings, audit opinions, leverage, and the degree to which regional finances depend on audit delays. 17 counties and cities in South Sumatra make up the study's population. 85 saturated samples from 17 districts and municipalities in South Sumatra were collected over a 5-year period and used in the study. Using document technology, data collection methods. Multiple linear regression analysis was conducted in this study using SPSS version 25. According to the findings of partial and concurrent investigations, regional government size (X1), audit findings (X2), audit opinion (X3), leverage (X4), and regional-level financial reliance (X5) had negligible or no effects on audit delays.*

**Keyword:** *Audit Delay, Size of Government, Audit Findings, Audit Opinion, Leverage, and level of regional Financial Dependences*

**ABSTRAK**

Di kabupaten dan kotamadya di Sumatera Selatan, studi ini berupaya memastikan ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, leverage, dan sejauh mana keuangan daerah bergantung pada penundaan audit. 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menjadi populasi penelitian. 85 sampel jenuh dari 17 kabupaten dan kotamadya di Sumatera Selatan dikumpulkan selama periode 5 tahun dan digunakan dalam penelitian ini. Menggunakan teknologi dokumen, metode pengumpulan data. Analisis regresi linier berganda dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS versi 25. Menurut temuan investigasi parsial dan bersamaan, ukuran pemerintah daerah (X1), temuan audit (X2), opini audit (X3), leverage (X4), dan daerah -tingkat financial reliance (X5) memiliki pengaruh yang dapat diabaikan atau tidak berpengaruh terhadap audit delay.

**Kata Kunci:** Audit Delay, Ukuran Pemerintahan, Temuan Audit, Opini Audit, Leverage, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

**PENDAHULUAN**

Dalam menangani keuangan negara daerah, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat melalui LKPD. Laporan keuangan memiliki sejumlah fitur kualitatif, salah satunya adalah relevan. Informasi yang relevan memberikan umpan balik,

prediktabilitas, dan tepat waktu dan lengkap. Kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi terkini, tentu saja, merupakan aset yang berharga.

Sesuai dengan UU/No.1/2004 tentang perbendaharaan negara dan UU RI nomor 15 Tahun 2004 tentang.

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan ketepatan waktu penyerahan LKPD. Dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun anggaran, LKPD harus diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan persetujuan (UU No.1/2004 Pasal 55 ayat 3). BPK harus memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD dalam waktu dua bulan sesudah menerima LKPD setelah pemeriksaan selesai (UU No.15/ 2004 Pasal 17 ayat 1 dan 2). LKPD yang sudah ditinjau harus disampaikan paling lambat lima bulan sesudah akhir tahun anggaran (Lase dan Sutaryo, 2014). Waktu antara rilis laporan keuangan dan rilis opini audit dikenal sebagai *audit delay*. Adapun jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang dari tahun 2016 – 2020 yang mengalami *audit delay* yaitu sejumlah 15 LHP atau 17,64% dari 85 LHP.

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat yang mengalami *audit delay* terutama pada tahun 2019. Karena pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan LKPD yang tidak diaudit kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan sesudah akhir tahun anggaran, pemerintah daerah tidak dapat melakukannya tepat waktu. Audit LKPD dapat memakan waktu hingga lima bulan sejak akhir tahun anggaran, jika diselesaikan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Nasional (SPKN). Oleh karena itu, LKPD BPK diterbitkan satu semester setelah LHP tahun anggaran berakhir, yang sebelumnya satu semester setelah itu. Mungkin ada penundaan antara akhir tahun fiskal dan penerbitan laporan audit sebab peninjauan atau prosedur audit yang memakan waktu. Dalam akuntansi,

ini dikenal sebagai *audit delay*, yaitu waktu yang diperlukan untuk menerbitkan laporan audit setelah akhir tahun fiskal (31 Desember).

Transaksi keuangan pemerintah daerah besar lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah kecil, menurut penelitian sebelumnya. Kompleksitas pengelolaan keuangan akan membuat penyusunan laporan keuangan menjadi lebih lama sebagai akibat dari meningkatnya volume transaksi. Ada bukti bahwa ukuran pemerintah daerah berdampak dan cukup besar terhadap *audit delay*, menurut Wibowo, Wafa, dan Vanesha (masing-masing 2019, 2018, dan 2020). Berbeda dengan penelitian ini, (Tullah et al, 2019) tidak menemukan hubungan antara ukuran pemerintah daerah dan *audit delay*.

Temuan audit mengungkapkan penyimpangan pemerintah daerah dari norma dan aturan pengelolaan keuangan. Waktu penyelesaian laporan yang lebih lama dan penundaan audit tambahan akan disebabkan oleh peningkatan volume temuan auditor. Berdasarkan hasil penelitian (Wafa, et al, 2018) menyatakan kalau temuan audit berdampak dan signifikan positif pada *Audit Delay*. Hal tersebut berlainan dengan temuan riset dari (Rachmawati, et al, 2016) yang menunjukkan kalau temuan audit berdampak negatif dan signifikan pada *audit delay*.

Untuk menghindari keterlambatan BPK LHP, sebaiknya tidak menyampaikan opini audit selain opini WTP kepada pemerintah daerah. WTP adalah tingkat keberhasilan tertinggi dalam standar akuntansi dan manajemen keuangan. Kepala daerah di Indonesia ingin melihat pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan opini BPK WTP. Untuk menghindari keterlambatan BPK LHP, sebaiknya tidak

menyampaikan opini audit selain opini WTP kepada pemerintah daerah. jadi. Opini audit selain opini WTP dapat menyebabkan waktu audit yang lebih lama, yang diterima secara luas. Sesuai dengan (Wibowo, dkk, 2019), (Wafa, dkk, 2018), dan (Armansyah, 2015), opini auditor berdampak dan signifikan pada proses audit. Menurut (Verwati et al, 2016), opini audit tak berdampak pada audit delay. Ini bertentangan dengan temuan kami.

Rasio utang terhadap ekuitas dikenal sebagai leverage. Waktu audit lebih pendek untuk rasio leverage yang lebih rendah karena pengujian menyeluruh tidak diperlukan, sedangkan rasio leverage yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak waktu sebab kompleksitasnya. Hasil penelitian (Siregar, 2015), (Bakar, et al, 2019), dan (Pratiwi, 2018) menyatakan kalau *leverage* berdampak dan signifikan pada *audit delay*. Hal ini berlainan dengan temuan riset dari (Jonarth, et al, 2016) yang menunjukkan kalau *leverage* tak berdampak pada *audit delay*.

Peneliti (Cohen dan Loventis, 2013) menemukan bahwa ketergantungan suatu daerah pada bantuan pemerintah pusat berdampak langsung pada kemampuannya untuk menyiapkan anggarannya tepat waktu karena kepatuhan yang lebih besar terhadap peraturan pemerintah pusat. pelaporan keuangan pemerintah dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk audit. Audit delay dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh besarnya ketergantungan keuangan daerah, menurut (Tullah et al, 2019). Sedangkan (Purnama dkk, 2018) menemukan korelasi negatif antara ketergantungan keuangan daerah dan audit delay, hal ini tidak terjadi di sini.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka perumusan masalah dalam riset ini

yaitu guna mengidentifikasi dampak parsial maupun simultan dari Ukuran Pemerintah daerah, Temuan Audit, Opini Audit, Leverage, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Dengan begitu, hasil riset ini bisa menjadi masukan buat Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan yang masih mengalami keterlambatan dalam menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan.

## **Telaah Literatur Dan Pengembangan Hipotesis**

### **Teori Keagenan**

Penundaan audit harus diperhitungkan ketika menerapkan teori keagenan. Karena nilai informasi laporan keuangan berkurang apabila laporan tak disampaikan tepat waktu, audit delay secara langsung terkait dengan waktu rilis laporan keuangan. Pengambil keputusan harus memiliki akses tepat waktu ke informasi agar dapat berdampak pada hasil proyek Ghozali dan Chariri, (2007) dalam (Muladi, 2014).

### **Audit Delay**

Terdapat audit delay jika auditor independen tidak menyelesaikan proses audit pada tanggal yang ditentukan dalam laporan auditor (Malinda, 2015). Bahkan untuk perusahaan publik, rilis tepat waktu dari laporan keuangan yang diaudit sangat penting, karena pasar modal adalah tempat perusahaan-perusahaan ini mendapatkan pendanaan mereka. Penting bahwa auditor memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan data yang cukup untuk mendukung temuannya.

### **Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah, menurut (Tullah, 2019), adalah

gambaran skala daerah. Entitas akuntansi berfungsi sebagai proxy untuk ukuran wilayah. Menurut UU/No. 17 / 2013 Keuangan Negara , pemerintah daerah yaitu Satuan kerja pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih mata pelajaran akuntansi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah pemerintah daerah yang menjadi subyek pelaporan.

### **Temuan Audit**

Norma dan peraturan pengelolaan keuangan pemerintah daerah ditemukan menyimpang dalam temuan audit. Sebelum dimasukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pemerintah daerah terkait akan dihubungi untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi atas temuan tersebut.

### **Opini Audit**

Sesuai dengan UU/No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini yang diberikan BPK yaitu: “Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) dan Opini TW (Tidak Wajar).

### **Leverage**

Rasio leverage (LVRG) menilai kapasitas untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang.

### **Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah**

Untuk menentukan ketergantungan keuangan suatu daerah pada pemerintah federal, bandingkan jumlah uang yang diterima daerah dalam pembayaran transfer dengan jumlah total uang yang diperoleh daerah tersebut.

### **Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap audit Delay**

Total aset dapat digunakan untuk mengukur ukuran pemerintah. Semakin banyak uang yang dimiliki pemerintah, semakin percaya diri dalam ramalannya. Dengan lebih banyak uang, pemerintah dapat melaporkan lebih cepat. Akibatnya, mereka berasumsi bahwa pemerintah dengan sumber daya atau aset keuangan yang signifikan akan dapat menyediakan lebih banyak laporan keuangan yang diaudit kepada publik karena mereka akan memiliki akses ke informasi dengan leluasa, lebih banyak akuntan, sistem informasi yang lebih baik, SPI yang lebih kuat, pengawasan investor dan peraturan, dan pengawasan publik (Siregar, 2015). Berdasarkan penjelasan dan riset itu bisa dirumuskan hipotesis pertama pada riset ini yaitu:

H1 : “Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *Audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

### **Pengaruh Temuan Audit Terhadap Audit Delay**

Dalam bentuk opini dan temuan audit, BPK mengkaji pelaporan keuangan pemerintah daerah. Masalah yang diperoleh oleh auditor di lapangan disebut sebagai temuan audit. Panjang laporan audit dipengaruhi oleh jumlah temuan audit. Seperti yang ditemukan (Cohen dan Leventis, 2013), kontak auditor-ke-auditor menjadi lebih mendalam dan membutuhkan waktu lebih lama pada saat ada masalah akuntansi. Audit telah menemukan masalah akuntansi yang serius. Sebagai akibat dari tingginya volume temuan audit, BPK akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memeriksa hasil dengan auditor lapangan serta pemerintah daerah sebelum temuan tersebut dapat memenuhi syarat untuk

dimasukkan dalam laporan audit. Berdasarkan penjelasan dan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam riset ini ialah:

H2 : “Temuan Audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan”.

### **Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay**

Hasil dari kerja lapangan digunakan untuk membentuk opini tentang masalah tersebut. Auditor tidak perlu memberikan opini audit berdasarkan hasil kerja lapangan jika tidak ditemukan masalah atau bukti penyimpangan besar dari GAAP, selama tidak ditemukan masalah material. harus mengawasi segala sesuatu yang dapat membahayakan keberhasilan penyelesaian audit, Yuana, (2008) dalam (Fendi Armansyah, 2015) . Berdasarkan penjelasan dan penelitian tersebut bisa dibuat hipotesis ketiga pada riset ini yaitu:

H3: “Opini Audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan”

### **Pengaruh Leverage Terhadap Audit Delay**

Rasio gearing dapat digunakan untuk menentukan rasio leverage. Akibatnya, auditor akan lebih fokus pada kewajiban sebagai akibat dari kenaikan gearing tinggi. Semakin banyak hutang yang dimiliki pemerintah, semakin banyak pengawasan yang diterimanya, yang memaksa pemerintah untuk menyiapkan laporan keuangan lebih cepat karena harus mempertanggungjawabkan uang yang telah diterimanya.(Vuko, *et al*, 2014), (Nuryatno, *et al*, 2018) menyebutkan bahwa *leverage* berdampak pada *audit*

*delay*. Sesuai dengan penjelasan dan penelitian itu bisa dibuat hipotesis keempat pada riset ini yaitu:

H4: “Leverage berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan”.

### **Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Audit Delay**

Setiap tahun, sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional, pemerintah pusat memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Adalah tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengontrol pemakaian DAU dan DAK di pemerintah daerah. Semakin sulit bagi Pemda yang sebagian besar mengandalkan bantuan pemerintah pusat guna mentaati standar pemerintah pusat, seperti melaporkan informasi keuangan secara tepat waktu Pemerintah daerah yang gagal menyerahkan laporan keuangan mereka tepat waktu kepada pemerintah federal berisiko terkena sanksi memiliki bantuan mereka disampaikan terlambat. Laporan keuangan pemerintah daerah akan dengan singkat disiapkan dan audit delay dapat dihindari. Sesuai dengan penjelasan dan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis kelima pada penelitian ini yaitu:

H5: “TKKD berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan”.

## **Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah Temuan Audit , Opini Audit, Leverage, Dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Audit Delay**

H6 : “Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Temuan Audit, *Leverage*, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap *Audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampelnya yaitu 17 Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun periode 2016 – 2020. Metode perolehan sampel pada riset ini yaitu menggunakan sampel jenuh dengan total sampel 85 yang didapat dari 17 kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan dikali 5 tahun. Data sekunder berupa dokumentasi yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah diaudit BPK lewat situs <http://sumsel/bpk.go.id>. Data tersebut kemudian diolah memakai software SPSS Versi 25 yang kompatibel dengan Windows.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Ukuran Pemerintahan Daerah (X1)**

Ukuran Pemerintahan yang mempunyai lebih banyak sumber daya melaporkan lebih sering daripada pemerintah dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Ukuran Pemerintah Daerah :

$$\text{ASSET} = \text{Ln Total Aset}$$

#### **Temuan Audit (X2)**

Temuan dari audit yaitu masalah yang diidentifikasi auditor di tempat kerja (Zaenal Wafa dan Nugraeni, 2018 :53). Temuan Audit : BPK menghitung

temuan audit yang tercantum dalam Temuan Audit Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran yang bersangkutan

#### **Opini Audit (X3)**

Pendapat auditor atas temuan audit atas laporan keuangan pada akhir periode dikenal sebagai opini audit (Maldefian Putra Bakar dan Fefri Indra Arza, 2019)

#### **Opini Audit: Kode 1 Untuk Opini WTP, Kode 0 Untuk Opini Non WTP Leverage (X4)**

Indikator ketergantungan suatu daerah pada kreditur untuk membiayai aset daerahnya adalah rasio leverage (LVRG). (Indah Puspa Sari, 2016)  
*Leverage* : Total Kewajiban/ Total Aset

#### **Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X5)**

Membandingkan total pembayaran transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah merupakan pendekatan untuk menentukan ketergantungan fiskal daerah. (Tullah, et al, 2016)

#### **TKKD : (Total Pendapatan Transfer/ Total Pendapat X100%)**

#### **Audit Delay (Y)**

Audit Delay yaitu durasi pelaksanaan pemeriksaan diukur dari akhir tahun anggaran sampai dengan hari BPK mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (Wafa, dkk : 2018)

Audit Delay = Jumlah hari antara tanggal tutup buku tahun anggaran pemda dengan tanggal diterbitkannya

#### **Model Penelitian**

Model persamaan regresi yaitu :

$$\text{AD} = \alpha + b_1\text{UPD} + b_2\text{TA} + b_3\text{OI} + b_4\text{LV} + b_5\text{TKKD} + e$$

Keterangan :

AD : *Audit Delay*

$\alpha$  : Konstanta

UPD : Ukuran Pemerintah Daerah

TA : Temuan Audit

OI : Opini Audit

LV : *Leverage*

TKKD : Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$  : Koefisien

$e$  : *Error Term*

### HASIL PENELITIAN DAN Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan informasi berupa mean (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, bilangan, jangkauan, kurtosis, dan skewness (kesenjangan distribusi), menurut (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif untuk data variabel terikat dan variabel bebas disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	N	Descriptive Statistics		Mean	Std. Deviation
		Minimum	Maximum		
Audit Delay Y	85	68.00	177.00	138.5294	26.39065
Ukuran Pemda X1	85	27.83	30.55	28.7987	.53991
Temuan Audit X2	85	2.00	19.00	7.9176	3.39892
Opini Audit X3	85	.00	1.00	.9647	.18562
Leverage X4	85	.01	18.41	2.6511	3.21150
TKKD X5	85	2.16	682.83	90.5626	66.83656
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022

### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda bisa diamati dalam tabel yaitu:

**Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	364,821	159,398		2,289	,025
	X1 Ukuran Pemda	-8,272	5,519	-,169	-1,499	,138
	X2 Temuan Audit	-,006	,914	-,001	-,007	,995
	X3 Opini Audit	9,125	17,017	,064	,536	,593
	X4 Leverage	,238	,982	,029	,242	,809
	X5 TKKD	,028	,046	,072	,612	,543

a. Dependent Variable: Y Audit Delay

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Persamaan regresi yang ditunjukkan di bawah ini berasal melalui temuan analisa regresi linier berganda dalam Tabel 2:

$$AD = 364,821 - 8,272UPD - 0,006TA + 9,125OA + 0,238LV + 0,028TKKD + e$$

Model regresi yang ditunjukkan di atas menunjukkan hubungan positif antara audit delay dan opini audit, leverage, dan ketergantungan keuangan daerah. Sedangkan terdapat korelasi yang buruk antara audit delay dan hasil audit dengan ukuran pemerintah daerah. Regresi ini kemudian paling baik dijelaskan sebagai berikut:

1. Poin Konstanta ( $\alpha$ ) mempunyai poin sekitar 364,821 berarti jika variabel Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Leverage dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah tak terjadi variasi atau tetap, alhasil variabel Audit Delay per Kabupaten/Kota bakal bernilai 364,821.
2. Nilai koefisien variabel ukuran pemerintah daerah adalah -8,272, artinya audit delay akan berkurang sebesar 8,272 jika ukuran pemerintah daerah bertambah. Koefisien negatif menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran pemerintah daerah dan audit delay berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai Ukuran Pemerintah Daerah, maka tingkat Audit Delay akan semakin menurun.
3. Nilai koefisien variabel hasil audit sebesar -0,006 yang menunjukkan bahwa jika hasil audit naik alhasil audit delay bakal turun sekitar 0,006. Menurut koefisien negatif, ada korelasi yang buruk antara temuan audit dan audit delay. Tingkat audit delay menurun seiring dengan meningkatnya nilai hasil audit.
4. Nilai koefisien variabel opini audit sebesar 9,125 yang artinya jika opini

audit naik maka audit delay juga meningkat sebesar 9,125. Koefisien positif berarti opini audit dan audit delay berhubungan positif. Tingkat audit delay meningkat seiring dengan meningkatnya nilai opini audit.

5. Koefisien leverage sebesar 0,238, yang menunjukkan bahwa semakin panjang leverage maka akan semakin lama audit delay. Leverage dan audit delay berkorelasi positif, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien positif. Tingkat audit delay meningkat seiring dengan meningkatnya nilai leverage
6. Variabel ketergantungan keuangan daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0,028 yang menunjukkan bahwa ketika naik maka audit delay juga naik sebesar 0,238. Koefisien positif menunjukkan korelasi positif antara audit delay dengan tingkat ketergantungan keuangan daerah. Derajat audit delay meningkat seiring dengan tingkat ketergantungan keuangan daerah.

### Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

#### Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis – Uji t

Variabel	t	Sig	Keterangan
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	-1,499	,138	H1 Ditolak
Temuan Audit (X2)	-,007	,995	H2 Ditolak
Opini Audit (X3)	,536	,593	H3 Ditolak
Leverage (X4)	,242	,809	H4 Ditolak
Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X5)	,612	,543	H5 Ditolak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022

### Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Audit Delay

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis peneliti, uji t peneliti (parsial) menghasilkan nilai t-hitung buat variabel Ukuran Pemerintahan Daerah sekitar -1.499. Poin t-hitung yang dihasilkan (-

1,499 < 1,990) < poin t-tabel. Selain itu, nilai signifikansi variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 0,138 yang berada di atas kriteria signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah provinsi/kota Sumatera Selatan memiliki pengaruh yang dapat diabaikan dan tidak signifikan terhadap variabel audit delay. Akibatnya, hipotesis awal riset ini terbantahkan. Selain itu, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi adalah 0,038 berdasarkan kekuatan atau pengujian korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas guna mengidentifikasi tingkat penjelasan variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menyatakan kalau opini audit dan variabel riset lainnya berpengaruh terhadap 3,8% variabel audit delay di kabupaten/kota Sumatera Selatan, sedangkan variabel penelitian lainnya berpengaruh terhadap sisanya sebesar 92%.

Temuan riset ini konsisten dengan temuan riset Tullah et al (2019), yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki sedikit atau tidak berdampak pada waktu audit. Karena entitas akuntansi yang lebih sedikit tidak selalu berarti penyampaian laporan keuangan yang lebih cepat, jumlah entitas tidak berpengaruh pada audit delay (Tullah, 183: 2019). Meskipun pemerintah daerah cukup besar, apabila didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif dan sesuai dengan aturan akuntansi yang relevan, audit delay tidak akan terjadi. Menurut teori kepatuhan, pemerintah yang lebih besar sering mengungkapkan laporan keuangan mereka lebih cepat dan patuh daripada yang lebih kecil, sebagai akibat dari banyaknya sumber informasi yang mengalir dari akuntan dan sistem informasi yang lebih canggih



(Purnomo, *et al*, 2018). Berbeda dengan temuan riset dari Wibowo,*et al* (2019), Wafa, *et al* (2018), dan Vanesha *et al* (2020) menyatakan kalau ukuran pemerintah daerah berdampak dan signifikan pada *Audit Delay*. Pengelolaan keuangan akan menjadi lebih rumit karena volume transaksi keuangan yang akan memperpanjang proses pembuatan laporan keuangan.

### **Pengaruh Temuan Audit Terhadap Audit Delay**

Variabel hasil audit mempunyai poin t-hitung sekitar -0,007 berdasarkan temuan parsial uji-t untuk variabel hasil audit. Nilai t-hitung yang dihitung ( $-0,007 < 1,990$ ) < poin t-tabel. Variabel hasil audit juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,095 yang lebih tinggi dari kriteria signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Maka bisa dikatakan kalau di kabupaten/kota Sumatera Selatan variabel hasil audit tak berdampak dan tidak signifikan pada variabel audit delay. Ini menyiratkan bahwa hipotesis kedua riset ini terbantahkan. Selain itu, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi adalah 0,038 berdasarkan kekuatan atau pengujian korelasi antara variabel terikat dan bebas guna mengidentifikasi tingkat penjelasan variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menyatakan kalau temuan audit dan variabel riset lainnya memiliki pengaruh terhadap 3,8% variabel audit delay di kabupaten/kota Sumatera Selatan, sedangkan variabel penelitian lainnya memiliki pengaruh sebesar 92% sisanya.

Menurut penelitian Rachmawati dkk. (2016), hasil audit berpengaruh negatif dan signifikan pada audit delay, hal ini menyatakan kalau hasil audit tak cukup berdampak pada audit delay. Studi ini mendukung temuan itu. Hasil audit mempengaruhi waktu audit,

berbeda dengan temuan Muladi (2014) dan Fachrurozi (2014). Karena penyimpangan SAP dan pelanggaran kepatuhan hukum dan peraturan lainnya, temuan audit terbukti dalam pendapat; maka dari itu, diperkirakan semakin banyak temuan audit maka proses audit akan semakin lama. Auditor tentunya akan menjalankan prosedur audit tambahan apabila terdapat temuan yang mengarah pada ketidakwajaran laporan keuangan untuk memperoleh bukti yang cukup. Waktu yang dibutuhkan auditor untuk menanggapi temuan juga akan lebih lama karena ada lebih banyak temuan. Penggunaan sampel dan periode waktu yang beragam menjadi penyebab disparitas ini.

### **Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay.**

Nilai t variabel opini audit sebesar 0,536 berdasarkan hasil uji t parsial. Nilai t-hitung yang dihasilkan ( $0,536 < 1,990$ ) lebih kecil dari nilai t-tabel. Selain itu, nilai signifikansi variabel opini audit sebesar 0,593 berada di atas taraf signifikansi 5 persen ( $\alpha = 0,05$ ) yang menunjukkan signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit di provinsi atau kota Sumatera Selatan tidak dan tidak berpengaruh secara substansial terhadap variabel audit delay. Hipotesis ketiga dalam penyelidikan ini dengan demikian terbantahkan. Selain itu, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi adalah 0,038 berdasarkan kekuatan atau pengujian korelasi antara variabel terikat dan bebas guna mengidentifikasi tingkat penjelasan variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menyatakan kalau opini audit dan variabel penelitian lainnya berpengaruh terhadap 3,8% variabel audit delay di kabupaten/kota Sumatera Selatan, sedangkan variabel

penelitian lainnya berpengaruh pada sisanya sebesar 92%.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Ibrahim dan Rosita (2016), yang menemukan bahwa kesimpulan dari opini audit tidak memiliki dampak yang cukup besar terhadap audit delay. Sebanyak 3 kabupaten/kota ditolak dalam penelitian ini, dengan persentase masing-masing 96,47 persen dan 3,53 persen, sedangkan 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan memperoleh opini diskualifikasi dari tahun 2016 hingga 2020. Perbandingan ini menunjukkan dengan tegas bahwa opini audit tidak memiliki opini diskualifikasi. terkait audit delay di kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan yang menghadapi audit delay di kota dari tahun 2016 hingga 2020. Perihal ini berlawanan dengan riset Tullah et al. (2019), yang menyatakan kalau dampak audit opinion delay pada audit delay adalah positif dan signifikan. Aryaningsih dan Budiarta (2014) mengklaim bahwa pemerintah daerah dapat mengalami audit delay yang lama jika mencari opini audit di luar WTP karena auditor perlu mencari dukungan tambahan untuk kesimpulan audit mereka. Ini akan memakan waktu untuk menemukan bukti dan temuan audit, yang menunjukkan penundaan audit. Menerima rekomendasi PAP menunjukkan tata kelola keuangan yang kuat di pihak pemerintah daerah, yang mengurangi penundaan audit. Penggunaan berbagai sampel dan periode waktu menghasilkan temuan penelitian yang beragam.

#### **Pengaruh Leverage Terhadap Audit Delay**

Nilai  $t$  variabel leverage sebesar 0,173 berdasarkan hasil uji  $t$  parsial. Nilai  $t$ -hitung yang dihasilkan (0,242 < 1,990) < nilai  $t$ -tabel. Variabel leverage

juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,809 lebih tinggi dari kriteria signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Maka bisa dinyatakan kalau variabel audit delay di kabupaten/kota Sumatera Selatan tidak berpengaruh dan tidak penting. Akibatnya, hipotesis keempat dalam penelitian ini tidak terbukti. Selain itu, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi adalah 0,038 berdasarkan kekuatan atau pengujian korelasi antara variabel terikat dan bebas guna mengidentifikasi tingkat penjelasan variabel independen terhadap variabel dependen. Maka, leverage dan variabel penelitian lainnya berpengaruh terhadap 3,8% variabel audit delay di kabupaten/kota Sumatera Selatan, sedangkan variabel penelitian lainnya berpengaruh pada 92% sisanya.

Temuan riset ini relevan dengan Ibrahim dan Rosita (2016) yang menunjukkan hasil Leverage tak berdampak dan tak signifikan pada *Audit Delay*. Walaupun pemerintah memiliki jumlah kewajiban yang cukup tinggi, Auditor tidak dapat memperluas audit mereka karena kepatuhan yang tepat waktu menjaga risiko ketidakpatuhan tetap rendah. Berbeda dengan hasil penelitian dari Vuko dan Cular (2014), Lestari dan Nuryatno (2018) menyampaikan kalau leverage berdampak pada audit delay. Leverage yang tinggi akan tentunya membuat auditor akan meningkatkan perhatiannya terhadap kewajiban. Hal ini karena berbagai sampel dan periode waktu yang digunakan.

#### **Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Audit Delay**

Variabel tingkat ketergantungan keuangan daerah memiliki nilai  $t$ -hitung sebesar 0,612 berdasarkan hasil uji  $t$  parsial. Nilai  $t$ -hitung (0,612 < 1,990)

lebih tinggi dari nilai t-tabel. Sementara itu, poin sig variabel Ketergantungan Keuangan Daerah  $> 0,05$  ( $0,542 > 0,05$ ) dan berada di atas taraf signifikansi 5 persen ( $\alpha = 0,05$ ) yaitu 0,543. Ini menyiratkan bahwa hipotesis kelima riset ini tidak didukung. Maka bisa disimpulkan kalau variabel audit delay untuk kabupaten/kota di Sumatera Selatan tidak dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat ketergantungan keuangan daerah. Selain itu, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi adalah 0,038 berdasarkan kekuatan atau pengujian korelasi antara variabel terikat dan bebas guna mengidentifikasi tingkat penjelasan variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah dan variabel penelitian lainnya berdampak pada 3,8% variabel audit delay di kabupaten/kota Sumatera Selatan, sedangkan variabel penelitian lainnya berpengaruh pada sisanya sebesar 92%.

Temuan riset ini relevan dengan Purnama, *et al* (2018) yang menunjukkan kalau Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berdampak negatif dan signifikan pada *Audit Delay*, artinya temuan audit belum cukup berdampak pada audit delay. Berbeda dengan temuan riset dari Tullah *et al* (2019) yang menunjukkan hasil Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berdampak positif dan signifikan pada *audit delay*. Muradi (2014) berpendapat bahwa ketergantungan keuangan daerah yang lebih besar mengurangi penundaan audit karena pemerintah pusat menghukum pemerintah daerah karena terlambat mengajukan laporan keuangan dengan menunda dukungan. Laporan. Penggunaan berbagai sampel dan

periode waktu menghasilkan temuan penelitian yang beragam

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis – Uji F**

Variabel	F	Sig	Keterangan
Ukuran Pemerintah Daerah (X1), Temuan Audit (X2), Opini Audit (X3), Leverage (X4), dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X5)	0,625	,681	H6 Ditolak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022

**Pengaruh Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Leverage, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah secara simultan terhadap Audit Delay**

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis, dampak Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Leverage, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah pada Audit Delay mempunyai poin Fhitung sekitar 0,625. Fhitung lebih kecil dari Ftabel sekitar 2,33 ( $0,625 < 2,33$ ). Selain itu, tingkat signifikansi untuk variabel seperti opini audit, ukuran pemerintah daerah, hasil audit, rasio leverage, dan ketergantungan keuangan daerah semuanya lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 (5 persen), atau 0,681. Sampai bisa diringkas kalau variabel Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Leverage, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah secara simultan tak berdampak dan tak signifikan pada Audit Delay di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan kalau hipotesis keenam riset ini benar.

Selain itu, jelas bahwa koefisien determinasi 0,038 didasarkan pada pengujian kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen untuk menilai tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berarti pada riset ini, opini audit, ukuran pemerintah daerah, hasil audit, leverage, dan ketergantungan keuangan daerah semuanya berpengaruh terhadap 3,8% variabel yang berhubungan dengan audit delay di kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sedangkan variabel lainnya berdampak pada 9 variabel sisanya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Temuan penelitian adalah sebagai berikut berdasarkan deskripsi dan analisis:

1. Secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah ( $X_1$ ) tidak berdampak dan tidak signifikan pada Audit Delay dengan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Secara parsial Temuan Audit ( $X_2$ ) tidak berdampak dan tidak signifikan pada Audit Delay dengan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Secara parsial Opini Audit ( $X_3$ ) tidak berdampak dan tidak signifikan pada Audit Delay dengan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Secara parsial Leverage ( $X_4$ ) tidak berdampak dan tidak signifikan pada Audit Delay dengan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
5. Secara parsial Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah ( $X_5$ ) berdampak dan tidak signifikan pada Audit Delay dengan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
6. Secara simultan Ukuran Pemerintah Daerah ( $X_1$ ), Temuan Audit ( $X_2$ ), Opini Audit ( $X_3$ ), Leverage ( $X_4$ ) dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah ( $X_5$ ) tidak berdampak dan tidak signifikan pada Audit Delay dengan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”.

### **Saran**

Disarankan untuk melakukan penelitian tambahan dengan sampel yang berbeda. Selanjutnya, fakta bahwa koefisien determinan penelitian ini hanya 3,8% menunjukkan bahwa sejumlah besar variabel independen lainnya juga mempengaruhi audit delay. Selanjutnya, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diubah atau diperluas oleh peneliti masa depan. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah tahun subjek penelitian, menambah topik penelitian, atau memperluas bidang studi

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Armansyah, Fendi. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Opini Auditor terhadap Audit Delay. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 4 Nomor 10.
- Aris Muladi, (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Delay pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
- Badan Pemeriksaan Keuangan. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang.
- (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang.
- (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang.

- (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang.
- (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang.
- Bakar, Maidelfian Putra dan Fefri Indra Arza. (2012). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Leverage Terhadap Audit Delay. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 1(3) : 1168-118, ISSN : 2656-3649
- Cohen, Sandra dan Stergios Leventis. 2013. Effect of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay. *Accounting Forum*. Volume 37(1) : 40-53.
- Fachrurozi, Luthfi. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Fachruzzaman, Nila Aprila dan Desi Siska Pratiwi. (2017). Pengaruh Opini Audit dan Kualitas Auditor Terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 7, No.3, ISSN 2303-0356
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Multivarieta dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Hardini, Ziza Gita dan Sukirman. (2016). Analisis Determinan Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Accounting Analisis Journal*. 5(1) : 2556-6765.
- Ibrahim, Alwin Malik dan Rosita Suryaningsih. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Reputasi KAP dan Opini Audit terhadap Audit Delay (Studi pada Perusahaan Sketor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi selama periode 2012-2014. *Ultima Accounting*. 8(1) Juni 2016.
- Jonartha, I Wayan Pion dan Bambang Suprasto H. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Keberadaan Komite Audit dan Leverage terhadap Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi*. 16(3) : 2302-8556.
- Malinda, Dwi Apriliane. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi empiris pada Perusahaan Perambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013. *Program Sarjana Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Muladi, A dan Sudarno, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*).
- Nuryatno, Muhammad dan Syarifah Yunindiah Lestari. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay dan Dampaknya terhadap Abnormal Return Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Junrna Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 2(1) : 2548 – 9283.
- Pratiwi, Desi Setiana. (2018). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit dan Komisaris Independen terhadap Audit Delay. *Magister Akuntansi FEB, Universitas Trisakti*. 2(1). E-ISSN : 2599 – 1175. ISSN : 2599 - 0136.

- Priyatno, D. (2018). *Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum*. Edisi Kesatu. Yogyakarta : Andi, ISBN: 978-979-29-7172-9.
- Purnama, Meryza, Rindu Rika Gamayuni dan Yunia Amelia. (2018). Pengaruh Opini Audit, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Audit Delay. *Graha Ilmu Universitas Lampung*.
- Puryati, Dwi. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay. *Jurnal Akuntansi*.7. P-ISSN: 2339-2436, E-ISSN : 2549-5968.
- Rachmawati, Sella, Rini dan Yessi Fitri. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1). P-ISSN : 1979-858X, e-ISSN : 2461-1190.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Romasi Lumban Gaol, Krista Srikandi Duha, (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JRAK* –7(1), Maret 2021, p-ISSN : 2443-1079 e-ISSN : 2715-8136
- Sari, Indah Puspa. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatera). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. 3(1) : 679-692.
- Siregar. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Audit Delay pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JRAK*. 11(2)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi Kedua. Cetakan Kesatu. Bandung : CV Alfabeta.
- Tullah, Dewi Sarifah, Erna Apriyanti dan Fitri Rianti. (2019). Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap *Auditi Delay* pada Pemda di Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2015-2016. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*. 12(2) : 2086 – 7662, e-ISSN : 2622-1950.
- Vanessa, Abriany dan Efrizal Syofyan. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Opini Audit dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya (Petahana) Terhadap Audit Delay pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 2(4) : 3389-3857, November 2020. ISSN: 2656-3649
- Verawati, Ni Made Adhika dan Made Gede Wirakusuma. (2016). Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit dan Komite Audit pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi*. Volume 17(2,) : 1083-1111
- Vuko, Tina dan Marko Cular. (2014). Finding Determinants of Audit Delay by Pooled OLS Regression Analysis. *Croatian Operational Research Review*. p.p :81-91
- Wibowo, Fajar Hendro dan Endang Purwaningsih. (2019). Pengaruh

Nilai APBD, Total Asset, Opini Audit, dan Latar Belakang Pendidikan terhadap *Audit Delay* Pemerintah Daerah di Subosukowonosraten. *Media Akuntansi*. 92(1).

Wafa, Zaenal dan Nugraeni. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *JRAMB*. 4(1). ISSN : 2460-1233.